

DINAMIKA RADIKALISME DAN KONFLIK BERSENTIMEN KEAGAMAAN DI SURAKARTA

Zakiyuddin Baidhawiy

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga

profetika@yahoo.com

Abstract

This paper tries to search for religious portrait that supports the process of radicalization which is potential in rising social fragmentation; and to study process and dynamics of conflicts, and ethnic, social-economic, political, and intra and inter-religious based radicalism. This study finds out that: Firstly, Surakarta has been known as burning city in political and SARA issues in Central Java and national level. Facts has shown that since 1910 this city witnessed mass riots and amok which are nuanced by ethnic, religious, and political issues. Indeed, some riots outspread their excess and influences to other cities around, such as May 1998 and October 1999 tragedies. Secondly, ideologically Surakarta is one of the well known cities as the breeding ground of radical Islamic groups, and Javanese traditional belief (Kejawen), which still firmly grasp their ancestor values influenced by both Kasunanan and Mangkunegeran kingdoms. Lastly, some religious based conflicts and violence and terrorism seem to be contemporary trend of radicalism in Solo.

Keywords: *Radicalism, Terrorism, Social Conflict, Religious Issues.*

Pendahuluan

Secara historis, Surakarta atau Solo sering dikaitkan dengan kebangkitan nasionalisme, sosialisme dan berbagai gerakan keagamaan. Sejarah mencatat bahwa kota ini bukan hanya tempat munculnya berbagai peristiwa konflik politik antara Kraton dan kolonialisme Belanda, bahkan juga merupakan pusat nasionalisme. Selama seperempat awal abad ke-20, Solo dan kawasan sekitarnya menyaksikan kelahiran sejumlah kelompok-kelompok independent dan partai-partai politik, seperti Syarikat Islam, Insulinde, National-Indische Partij, PKI, dan Sarekat Ra'jat. Kota ini juga melahirkan banyak tokoh terkenal, seperti presiden pertama RI Soekarno, aktivis dan jurnalis radikal Marco Kartodikromo, sosialis ternama Tjipto Mangunkusumo, dan komunis terkemuka Haji Mohammad Misbach.

Konflik etnik juga merupakan wajah lain dari dinamika sosial Solo sebagai akibat dari fragmentasi sosial dan etnisitas di satu sisi, dan kesenjangan ekonomi, kekuasaan politik, serta perbedaan budaya dan agama, tingkat pendidikan dan lainnya¹. Ada beberapa peristiwa konflik etnik antara Jawa-China dan Jawa-Encik (keturunan Arab), sekaligus antara *pribumi* dan *non-pribumi* (yakni antara Jawa dan non-Jawa).

Radikalisme Islam di Surakarta terus membentuk hubungan-hubungan social sebagaimana dicatat oleh banyak media internasional sejak kejatuhan

¹ Nurhadiantomo, *Konflik-konflik Sosial Pri-Non Pri dan Hukum Keadilan Sosial*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), h.23

Soeharto pada 1990-an.² Sebagian organisasi massa Islam terlibat aktif dalam aksi-aksi sosial, seperti protes terhadap pendeta Wilson, menuntut penutupan diskotik dan *night clubs* selama Ramadhan, menentang invasi Amerika Serikat ke Irak, dan menuntut penerapan syariah di Indonesia.

Radikalisme Islam juga menjadi lebih bergaung setelah bom Bali pada 12 Oktober 2001. Surakarta dipandang sebagai lahan subur bagi penyemaian Islam radikal karena aktivitas mereka terkait dengan jaringan organisasi-organisasi seperti *Jamaah Islamiyah* (JI) dan teroris internasional seperti KMMM (kelompok Militer Muslim Malaysia). Para pelaku bom Bali dan beberapa tempat lain dipandang mempunyai keterkaitan erat dengan pemimpin local Ustaz Abubakar Ba'asyir yang memimpin pondok pesantren al-Mukmin Ngruki, dan imam Majelis Mujahidin Indonesia dan terakhir *Jamaah Anshorut Tauhid* (JAT).

Fakta-fakta di muka menunjukkan bahwa radikalisme, baik yang berlatar belakang politik, sentimen etnik, hingga keagamaan, terus mewarnai sejarah Surakarta. Satu dekade terakhir melukiskan pengalaman berbagai konflik serius antara berbagai kelompok Islam dan konflik antaragama. Militansi dan radikalisasi yang dipropagandakan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam rangka meraih tujuan-tujuan politik mereka, dipandang berada di belakang semua konflik kontemporer.

Kajian ini berupaya memotret peta keagamaan yang menunjang proses radikalisasi yang berpotensi pada fragmentasi sosial; proses dan dinamika konflik dan radikalisme berbasis etnik, sosial-ekonomi, politik, dan hubungan intra dan antaragama.

Lanskap Kota Surakarta

Solo adalah wilayah yang sangat strategis. Awalnya ia merupakan wilayah karesidenan yang meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten (Subosukawonosraten). Kini, Surakarta menjadi sebuah kotamadya di bawah pemerintahan seorang walikota. Kota ini mempunyai luas wilayah mencapai 44,06 km² yang terbagi ke dalam lima kecamatan, yaitu Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres dan Banjarsari, dan 51 kelurahan. Sebagian besar lahan di wilayah ini digunakan untuk permukiman sebesar 61,68%, dan kegiatan ekonomi berkisar 20% dari luas lahan yang ada.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2007, Penduduk Surakarta berjumlah 515.372 jiwa, terdiri dari 246.132 laki-laki dan 269.240 perempuan, dengan rasio jenis kelamin 91,42, yang artinya bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 92 penduduk laki-laki. Menurut monograf kelurahan yang dihimpun oleh BPS Surakarta tahun 2007, jumlah penduduk Solo tersebar di lima kecamatan Laweyan sebesar 109.447 jiwa, Serengan sebesar

² Fananie, Zainuddin et.al. *Radikalisme Keagamaan dan Perubahan Sosial* (Surakarta: Muhammadiyah University Press dan The Asia Foundation, 2002).

63.429 jiwa, Pasar Kliwon sebesar 87.508 jiwa, Jebres 143.289 jiwa, dan terbesar Banjarsari dengan 161.247.

Jumlah penduduk di atas dibandingkan dengan luas wilayah kota yang hanya mencapai 44.06 km² ini, maka diperoleh tingkat kepadatan rata-rata 12.827 jiwa/km², suatu tingkat kepadatan yang relatif tinggi. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Serengan yang mencapai 19.884.³

Jumlah penduduk bekerja pada 2007 mencapai 261.143 (50,67%) dari total penduduk Surakarta. Penduduk wanita bekerja mencapai angka 42,81% dari penduduk yang bekerja. Menurut data banyaknya penduduk berdasarkan kelompok umur, diketahui bahwa presentasi penduduk usia produktif (15-59 tahun) mencapai 67,14%. Jumlah ini cukup besar, sementara pada saat yang sama jumlah pencari kerja yang belum ditempatkan mencapai 9.017 jiwa pada periode 2006/2007. Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan dengan pencari kerja pada periode 2005/2006 yang mencapai 6.589 jiwa.⁴

Besarnya jumlah pengangguran bisa memberikan pengaruh pada stabilitas sosial-ekonomi, seperti tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat pada tahun 2007 memperlihatkan kategori-kategori keluarga sejahtera (KS) menurut standarisasi BKKBN sebagai berikut: keluarga pra KS mencapai 11,18% (13.233 KK), KS I mencapai 22,81% (26.982 KK), KS II mencapai 24,97% (29.545 KK), KS III mencapai 27,59% (32.645 KK), dan KS III + mencapai 13,42% (15.884 KK).⁵ Bila kategori KS II dijadikan median tingkat kesejahteraan masyarakat rata-rata atau sejahtera dalam pengertian normal, maka jumlah keluarga yang berada dibawah garis kesejahteraan rata-rata sebesar 33,99% (40.215 KK), suatu petunjuk awal bahwa kemiskinan merupakan masalah nyata di kota ini.

Konstelasi Keagamaan

Surakarta adalah kota yang plural dalam hal agama. Hidup agama-agama besar seperti Islam, Kristen Katholik, Protestan, Budha dan Hindu. Lima agama resmi yang diakui pemerintah ini terus hidup hingga kini. Meskipun ada penganut Konghucu telah diakui oleh pemerintah pasca Orde Baru, namun secara statistik pemeluk agama ini belum terdaftar dalam data Badan Pusat Statistik maupun Departemen Agama. BPS masih memasukkan penganut Konghucu ke dalam penganut agama Budha.

Hingga kini kota Solo masih didominasi oleh penduduk beragama Islam dengan jumlah 412.283 (73,18%). Peringkat kedua diduduki oleh Kristen Katholik sebesar 74.355 (13,19%). Berikutnya berturut-turut ditempati oleh Kristen Protestan dengan jumlah pemeluk sebesar 69.971 (12,42%), Budha sebesar 4.605

³ BPS Surakarta, 2007, h.37-39

⁴ BPS Surakarta, 2007, h. 37, 61

⁵ BPS Surakarta, 2007, h. 50

(0,81%), dan Hindu sebesar 2.141 (0,38%). Adapun sebaran penduduk menurut agama di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1

Banyaknya Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Kota Surakarta 2007, 1997, 1987, dan 1977

Kecamatan	Islam	Katholik	Protestan	Budha	Hindu	Jumlah
Laweyan	87.465	10.443	10.586	421	532	109.447
Serengan	48.123	7.322.	6.257	93	69	61.864
Pasar Kliwon	67.349	10.220	8.929	832	178	87.508
Jebres	96.342	21.767	22.473	1.850	857	143.289
Banjarsari	113.004	24.603	21.726	1.409	505	161.247
Kota	412.283	74.355	69.971	4.605	2.141	563.355
1997	394.184	71.858	65.931	4.771	2.643	539.387
1987	374.825	60.997	64.321	5.277	2.718	508.138
1977	308.402	41.670	45.401	2.587	3.464	401.524

Diolah dari BPS Surakarta, Surakarta dalam Angka Tahun 1977, 1987, 1997, dan 2007.

Tabel di atas menggambarkan adanya dua komunitas agama besar yang dominan, yakni Islam dan Kristen. Data ini juga menunjukkan bahwa Surakarta mengalami dinamika dalam komposisi penduduk berdasarkan agama yang dianut. Terlihat bahwa dalam tiga dekade terakhir, penduduk Kristen Katholik dan Protestan terus mengalami peningkatan dari sebesar 21,68% (1977), menjadi 24,6% (1987), menjadi 25,54% (1997), dan 25,61% (2007). Pada saat yang sama, penduduk Muslim mengalami penurunan dari 76% (1977), menjadi 73,76% (1987), menjadi 73,07% (1997), dan 73,18% (2007).

Data di muka menunjukkan bahwa ada kontestasi antara Islamisasi dan Kristenisasi, di mana Kristenisasi tampak memenangi perebutan antarpemeluk agama. Dari sini juga bisa dilihat bahwa kenaikan jumlah pengikut Katholik dan Kristen meningkat 3,6% antara 1977-1987. Sementara pada dua dekade terakhir hanya meningkat 0,7% yang diperkirakan berasal dari penambahan keturunan. Sementara itu, penduduk Muslim mengalami sebaliknya. Penurunan jumlah pemeluk agama Islam sangat kentara terjadi pada 1977-1987 sekitar 3,76% dan antara 1987-1997 sebesar 0,69%, meskipun kemudian meningkat pada 2007 sekitar 0,11%. Peningkatan pada 2007 ini bisa dimaknai berasal dari pertumbuhan keturunan Muslim.

Untuk memenuhi kebutuhan spiritualitas pemeluk agama-agama, tersebar tempat-tempat peribadatan di seluruh Kota Solo. Sebagai mayoritas penduduk Muslim memiliki tempat peribadatan sebanyak 502 masjid dan 307 mushola. Tempat peribadatan lainnya terdiri dari 5 gereja Katholik, 166 gereja Kristen, 6 vihara/klenteng/kuil, dan 4 pura. Antara tahun 2001-2007 jumlah masjid meningkat dari 419 menjadi 502, dan mushola menurun dari 327 menjadi 307.⁶ Data ini menunjukkan ada sejumlah mushola yang dikembangkan menjadi

⁶ BPS Surakarta, 2007, h. 99

masjid sehingga kuantitas mushola berkurang. Peningkatan jumlah bangunan peribadatan kaum Muslimin secara keseluruhan dalam kurun ini sebesar 8,44%; sementara peningkatan gereja Kristen sebesar 34,9%. Pada waktu yang sama, gereja Katholik tidak mengalami pertumbuhan. Ini sangat berbeda dengan pertumbuhan gereja Kristen yang mengalami peningkatan pesat dari 123 menjadi 166 bangunan; sementara vihara menurun dari 7 menjadi 6, dan pura bertambah satu bangunan.

Gambaran perkembangan bangunan tempat peribadatan di atas menegaskan bahwa kontestasi dakwah dan misi terjadi antara Islam dan Kristen Protestan utamanya. Meskipun jumlah gereja Katholik stagnan dalam enam tahun terakhir, bukan berarti Katholik diam dalam aksi-aksi Kristenisasi. Upayanya bukan pada memperbanyak jumlah gerejanya, namun lebih pada melipatgandakan pengikutnya dan terbukti menempati urutan kedua dari segi kuantitas. Peningkatan signifikan jumlah gereja Protestan bisa dipahami bukan semata dalam konteks Kristenisasi, namun juga banyaknya denominasi atau aliran dalam tubuh agama ini. Kristenisasi dengan indikasi tumbuhnya bangunan-bangunan gereja Kristen dapat dilihat dari kemunculan gereja-gereja Kristen di berbagai pelosok kota ini.

Pasca reformasi perkembangan keagamaan semakin marak. Berbagai kelompok keagamaan - utamanya dalam tubuh masyarakat Muslim - tumbuh subur. Kebebasan yang semakin terbuka merupakan prakondisi yang kondusif bagi munculnya kelompok-kelompok Islam radikal antara lain: Laskar Hizbullah Sunan Bonang, Laskar Jundullah, Laskar Zilfikar, Laskar Salamah, Laskar Teratai Emas, Laskar Honggo Dermo, Laskar Hamas, Laskar Hawariyyun, Barisan Bismillah, Gerakan Pemuda Ka'bah, Brigade Hizbullah, dan Majelis Ta'lim al-Islah, Forum Komunikasi Aktivis Masjid (FKAM), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pemuda Islam Surakarta, HTI, Forum Umat Islam Surakarta, dan Jamaah Anshorut Tauhid, dan lain-lain. Kekuatan kelompok-kelompok Islam yang diidentifikasi sebagai moderat masih didominasi oleh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Muhammadiyah adalah kelompok terbesar di kota Solo dan diharapkan tetap muncul sebagai kekuatan penyeimbang bagi kelompok-kelompok Islam radikal. Solo juga merupakan basis bagi komunitas Islam nominal yang lekat dengan pola keberagamaan kejawaan yang sinkretik.

Kelompok-kelompok Islam baru pasca reformasi itu menunjukkan radikalisme terkait masalah kristenisasi. Kontestasi islamisasi-kristenisasi pada awalnya berada di bawah permukaan. Bersamaan dengan merebaknya gerakan radikal itu, kontestasi dan konflik Islam-Kristen mulai mengemuka, seperti akan diulas pada bagian berikutnya.

Akar Konflik dan Radikalisasi

Solo sering disebut sebagai kota bersumbu pendek dan mudah terbakar. Kota ini memiliki sejarah tiga abad konflik komunal. Yakni konflik sosial dan kekerasan sosial antara dua kelompok komunitas, di mana satu kelompok menjadi sasaran kekerasan dan amuk kelompok lainnya. Konflik komunal semacam ini dapat terjadi atas dasar etnisitas, agama, kelas sosial, dan afiliasi politik.⁷

Agar konflik dan kekerasan komunal dapat dipahami secara lebih tepat, dua perspektif perlu dikemukakan di sini. *Pertama*, analisis historis tentang akar-akar perilaku kekerasan. Analisis ini diperlukan dalam rangka untuk mengakhiri kekerasan dan konflik tersebut. Cukup banyak analisis yang mendasarkan diri pada keyakinan bahwa kekerasan dan konflik sosial merupakan warisan Orde Baru. Namun melalui analisis historis ini diharapkan sorotan komprehensif tentang spiral kekerasan dan konflik itu bisa dibaca secara berkesinambungan. Artinya seseorang tidak dapat mengabaikan peristiwa-peristiwa kerusuhan yang pernah terjadi pada era kerajaan Mataram, era kolonial, era revolusi, Orde Lama dan bahkan masa-masa sesudahnya. Ada banyak kekerasan dan konflik dalam masa-masa pra kolonial. Namun, mencari akar historis dapat menghasilkan simplifikasi kultural, yang memandang kekerasan dan konflik sebagai inheren dalam dan merupakan karakter dari kebudayaan tertentu. Untuk menghindari simplifikasi semacam ini, juga dibutuhkan penjelasan tentang akar-akar kultural dari kekerasan itu sendiri. Kebudayaan dapat menjelaskan kekerasan jika kebudayaan dilihat sebagai sebagai seperangkat perilaku dan gagasan sosial yang dinamis, berbeda dan mungkin juga kontradiktif.

1. Konflik Etnik Cina-Jawa

Sejarah kekerasan sudah mulai muncul di Surakarta sejak pertengahan abad 18. Konflik kali pertama yang mengawali kelahiran kota ini adalah pemberontakan etnik Cina terhadap karaton Kartasura. Laskar pemberontak Cina atas Paku Buwana II, raja Mataram kala itu, telah memaksa raja melarikan diri. Karaton yang terletak sekitar 10 km di barat kota Solo itu lalu diduduki pasukan Cina pimpinan Mas Garendi, alias Sunan Kuning, pada 30 Juni 1742. Geger Pecinan ini berawal dari pemberontakan orang-orang Cina di Batavia melawan kekuasaan Kompeni. Mengapa mereka menggempur Kartasura? Kerajaan Jawa ini dianggap mereka sebagai boneka Belanda. Sejak pasukan Cina mengepung Istana Mataram, pada awal 1741, sejumlah bangsawan sudah meninggalkan karaton. Pangeran Puger, misalnya, membangun pertahanan di daerah Sukowati, Sragen, untuk melawan Belanda. Mangkunegara, yang ketika itu berusia 19 tahun dan masih bernama RM. Said, membangun pertahanan di Randulawang, sebelah utara Surakarta. Ia

⁷ Tadjoeeddin, Mohammad Zulfan, "Anatomy of Social Violence in the Context of Transition: The Case of Indonesia 1990-2001", UNSFIR working papers, 2002.

bergabung dengan laskar Sunan Kuning melawan Kompeni. Said diangkat sebagai panglima perang bergelar Pangeran Perang Wedana Pamot Besar. Ia menikah dengan Raden Ayu Kusuma Patahati. Adapun Pangeran Mangkubumi justru lari ke Semarang, menemui penguasa Belanda dan meminta dirinya dirajakan. Kompeni menolak permintaan itu. Ia kemudian bergabung dengan Puger di Sukowati. Berkat bantuan Belanda, laskar pemberontak Cina diusir dari Istana Kartasura. Meski pemberontakan Cina kedua mengalami kegagalan, namun ini menjadi pertanda buruk bagi keutuhan kekuasaan negara Jawa di bawah kekuasaan Mataram.

Pembunuhan terhadap penduduk etnis keturunan Cina juga terjadi pada perang zaman Diponegoro atau yang dikenal dengan perang Jawa tahun 1825-1830. Pembunuhan ini terjadi sebagai akibat kebencian dan kecemburuan orang-orang pribumi terhadap etnik Cina yang memperoleh beberapa hak istimewa, seperti pemborongan dan persewaan. Pemborongan terdiri atas pemborongan tol dan pemborongan berbagai sarana lain seperti pasar, tempat pemotongan hewan, rumah judi, syahbandar pelabuhan sungai, penambangan perahu, tempat penjualan dan pepadatan candu, bahkan termasuk ijin berburu di hutan. Persewaan tanah-tanah *apanage* milik para bangsawan Jawa untuk memasok pasar-pasar lokal dengan barang-barang hasil bumi domestik dilakukan oleh para pengusaha Cina. Para pengusaha Cina ini memiliki kekuasaan yang luas di tanah-tanah sewaanannya. Sebagian mereka menjadi tuan tanah gaya Eropa dengan wewenang otonomi yang luas.⁸

Awal abad 20 menyaksikan kembali konflik etnik Jawa-Cina. Konflik ini bermula ketika orang-orang Cina mulai membangkitkan kembali kegiatan dagang mereka setelah dilonggarkan ruang geraknya dan dihapuskannya sistem pas jalan. Industri batik di Surakarta yang mengontrol pasar nasional menjadi salah satu lahan utama bagi investasi modal mereka. Persaingan orang Cina ini cukup dirasakan oleh pengusaha dan pedagang batik bumiputera, terlebih karena bahan-bahan katun dan lainnya yang diimpor oleh firma-firma Eropa dari luar negeri dikuasai oleh para pedagang Cina dan Arab. Konflik menajam ketika *Kong Sing* atau perkumpulan orang-orang Cina berhadapan dengan perkumpulan *Rekso Roemekso* yang dibentuk oleh H. Samanhoedi dan ia sendiri menjadi ketuanya. Seketika timbul perkelahian antara anggota *Kong Sing* dan anggota *Rekso Roemekso*. Pada akhir-akhir 1911 hingga awal 1912, serangkaian perkelahian jalanan antara perkumpulan Cina dan Jawa ini terjadi.

⁸ Soedarmono, "Masyarakat Cina di Indonesia (Case Study in Surakarta)", makalah disampaikan pada Seminar Nasional Sinologi Lembaga Kebudayaan Muhammadiyah Malang Malang, 3-4 Maret 2006.

Rekso Roemekso kemudian bermetamorfosa menjadi Sarekat Islam (SI) walaupun orang-orang Solo lebih suka menamakannya Sarekat Dagang Islam. SI yang didirikan pada 11 Nopember 1912, adalah gerakan sosial pertama yang mengkombinasikan antara kepentingan politik dan motif keagamaan, meski pada awalnya ia muncul karena perselisihan kepentingan ekonomi dengan orang-orang Cina. Gerakan dan organisasi ini bertujuan membuat anggota perkumpulan sebagai saudara satu sama lain, memperkuat solidaritas dan tolong-menolong diantara umat Islam, dan mencoba mengangkat rakyat untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan, dan kejayaan raja melalui segala cara yang tidak bertentangan dengan hukum negara dan pemerintahan. Meski secara organisasi, SI sudah memiliki anggaran dasar dan berjuang demi kemajuan Islam bagi bumiputera, namun ia tetap mengacu pada Rekso Roemekso yang merupakan organisasi ronda dan bukan pada perkumpulan dagang.

Pada tahun 1916 konflik Jawa-Cina kembali terjadi, di mana SI masih tetap menjadi aktor utamanya. SI saat itu mulai memperkenalkan bentuk baru gerakan dan boikot dengan metode kekerasan di bawah kepemimpinan Tirtoadhisoejo dan Martodharsono. Gerakan dan boikot merupakan reaksi SI atas perilaku kaum muda Cina yang memuakkan etnik Jawa. Mereka mengubah penampilan seperti sinyo, berpakaian gaya barat dengan kuncir dipotong. Dengan cara ini mereka ingin tampil "modern". Banyak orang Belanda dan para pegawai sipil Jawa menyaksikan bahwa orang-orang Cina mulai berperilaku angkuh dan mencoba meniru gaya hidup Eropa dan meletakkan kaum elite Jawa berada pada posisi subordinat. Perubahan ini dilihat orang Jawa sebagai tanda bahwa orang-orang Cina telah berada di luar dan di atas hirarkhi tata sosial Jawa.

Sementara itu, perdagangan Cina semakin hebat dan melahirkan boikot pasar oleh firma-firma Cina. Kain batik milik bumiputera dihargai rendah oleh Cina. Para pedagang Muslim melakukan aksi balasan terhadap pengusaha dan perusahaan-perusahaan Cina. Bersamaan dengan boikot, perkelahian antara Cina dan anggota SI semakin meningkat, dari perkelahian kecil hingga melibatkan puluhan legiun Mangkunegaran yang memukuli orang-orang Cina. Bahkan anak-anak Jawa yang berada di bawah perkumpulan *Soetarsa Moelja* juga berkelahi dengan anak-anak Cina. Sejak SI semakin besar dan zaman nasionalisme terus tumbuh, maka pada saat ini pula perkelahian dan kekerasan antar etnik Cina-Jawa semakin mengendur.

Konflik, ketegangan, dan perselisihan etnik Cina-Jawa yang memiliki sejarah panjang rupanya telah memendam prasangka buruk, stereotif, dan bias, dan menjadi bom waktu. Hal ini terbukti pada masa pemberontakan G30S/PKI. Rakyat yang setia pada Pancasila marah

terhadap PKI. Perlawanan rakyat tidak hanya menjadikan PKI sebagai target, bahkan orang-orang Cina pun tidak lepas dari sasaran mereka. Alasannya karena banyak warga Cina masa itu menjadi anggota BAPERKI yang secara terang-terangan mendukung PKI. Selain itu, sebelum meletus G30S/ PKI, banyak toko-toko Cina memasang papan nama dengan huruf Cina dan pada hari-hari besar RRC mereka juga mengibarkan bendera RRC.⁹ Akibatnya, para demonstran melakukan perusakan terhadap toko-toko milik Cina di kawasan Nonongan dan Coyudan pada 6 Nopember 1966.

Dua kampus, dua kerusuhan menandai konflik Jawa-Cina pada dua dekade menjelang akhir abad 20. Kerusuhan etnik pada Nopember 1980 dipicu oleh perkelahian antara dua pemuda Jawa dan Cina di dekat Pasar Gede. Perkelahian antar etnik ini kemudian menimbulkan kemarahan besar di kalangan warga yang diorganisir oleh beberapa mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) untuk melakukan aksi pembalasan. Tanpa diduga, ternyata aksi balas dendam ini menyulut pembakaran dan penjarahan toko-toko milik orang Cina oleh ribuan massa. Kerusuhan ini tidak hanya terjadi di Surakarta, bahkan merambat ke beberapa kota lain di Jawa Tengah, seperti Semarang dan Pekalongan. Akibat kerusuhan ini tercatat 15 pabrik, 54 toko dan rumah rusak dibakar. Meski tidak ada korban jiwa, peristiwa dicatat sebagai kerusuhan besar pada masa Orba.

Konflik Jawa-Cina berikutnya adalah peristiwa 14-15 Mei 1998. Ini merupakan peristiwa mutakhir beberapa hari menjelang runtuhnya rezim Orde Baru dan Soeharto. Kerusuhan ini ditengarai sebagai kerusuhan terbesar sepanjang sejarah Surakarta. Selama kerusuhan dua hari itu, korban tewas tercatat 29 orang, 307 buah bangunan terbakar meliputi toko, plaza, show room, bank, dan 2 swalayan Matahari. Perlu dicatat di sini bahwa toko-toko Cina dibakar hanya merupakan sebagian sasaran dari kerusakan dan penjarahan yang meluas di berbagai sudut kota.

Konflik dan kerusuhan Mei 1998 ini telah melahirkan sejumlah dampak buruk antara lain: perilaku kekerasan anak jalanan, membanjirnya pekerja seks komersial liar, pengamen jalanan meresahkan pengguna jalan, aneksasi tempat umum sebagai tempat usaha informal, dan hilangnya kesempatan kerja 50.000-70.000 orang yang menimbulkan stres berat.¹⁰

Era reformasi dan transisi mengalami hal serupa. Delapan belas bulan setelah peristiwa Mei 1998, tepatnya pada Nopember 1999, kembali Surakarta dilanda kerusuhan akibat marahnya massa dari PDI-P karena tokoh idola mereka gagal menggantikan Habibie sebagai Presiden RI.

⁹ Mulyadi, M. Hari dan Soedarmono (dkk). *Runtuhnya Kekuasaan Kraton Alit: Studi Radikalisasi Sosial "Wong Sala" dan Kerusuhan Mei 1998*. Surakarta: LPTP, 1999.h.301

¹⁰ Agus, Sri, *Sikap dan Prilaku Masyarakat Surakarta Pasca Kerusuhan Mei 1998*. Surakarta: Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret, 2000.h.61-61

Sebagai pelampiasan amarah mereka membakar gedung-gedung pemerintah, termasuk gedung Balai kota yang diarsiteki oleh Bung Karno.

Kasus-kasus kekerasan dan konflik sosial tersebut di muka menggambarkan kompleksitas peristiwa dan penyebabnya. Akar penyebab konflik ini tidak semata kepentingan dan persaingan ekonomi, politik, agama, etnik, dan ideologi, namun juga provokator. Akar penyebab yang disebut terakhir utamanya berkait dengan peristiwa kelam Mei 1998. Saat itu, ada demonstrasi mahasiswa besar-besaran berpusat di UMS. Mereka bergerak dari kampus menuju kota Surakarta. Kira-kira baru berjalan 2 kilo meter, sebelum Pasar Kleco, ternyata sudah terjadi bakar-bakaran dari sebelah timur jembatan Kleco hingga ke pusat kota. Para provokator ini bergerak cepat dan dalang sesungguhnya adalah para elite politik yang sedang berkelahi.

Faktor kultural dalam konflik etnik ini adalah permusuhan *latent* antara kaum pribumi dan non-pribumi sudarmono dalam Sugairtoto.¹¹ Perangkat perilaku dan gagasan antara kaum pribumi Jawa Solo berbeda dan bahkan kontradiktif dengan sistem kultural orang-orang Cina. Orang Jawa yang Muslim dan terikat oleh sejumlah nilai-nilai, berbeda dan bahkan bertentangan dengan kultur Cina yang serba boleh, misal dalam hal makanan. Inilah yang kemudian melahirkan sejumlah prasangka, diskriminasi dan konflik antara dua kelompok ini lebih-lebih pada saat krisis.

Mayoritas biasanya memiliki stereotip terhadap minoritas. Misalnya dikatakan bahwa setiap peranakan Cina adalah pedagang. Faktanya tidak sepenuhnya benar. Stererotip lain mengatakan bahwa pedagang Cina selalu tidak jujur. Mereka sering mempraktekkan cara-cara berdagang yang tidak disukai. Kaum imigran Cina yang baru datang di Indonesia tidak segan-segan melakukan praktek dagang yang menyimpang. Citra tentang minoritas dengan karakteristik tertentu memang memiliki dasar namun tidak semuanya benar. Keturunan Cina yang sudah tinggal selama dua atau tiga generasi memiliki karakteristik yang sama sekali berbeda dengan pendatang baru. Namun, karena mereka belum berbaur dengan masyarakat mayoritas di mana mereka tinggal, mereka akhirnya diasosiasikan dengan kelompok minoritas lainnya Ham dalam.¹²

2. Konflik Politik Karaton

Menurut KRHT Wirodiningrat, karaton memiliki tujuh dimensi: 1) Karaton berarti kerajaan; 2) Karaton berarti kekuasaan raja yang mengandung dua aspek, yakni kenegaraan (*Staatsrechtelijk*) dan magis-

¹¹ Sugiartoto, Agus Dody. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kota Solo: Pendekatan Pembangunan Nguwongke Uwong*. Surakarta: IPGI, 2003.h.10

¹² Suryadinata, Leo., ed. *Political Thinking of the Indonesian Chinese 1900-1995: A Sourcebook*. Singapore: Singapore University Press, 1999. H.150-151

religius (*magischreligieus*); 3) Karaton berarti penjelmaan “Wahyu nurbuwat” dan oleh karena itu menjadi pepunden dalam Kajawen; 4) Karaton berarti istana, kedaton “Dhatulaya” (rumah); 5) bentuk bangunan Karaton yang unik dan khas mengandung makna simbolik yang tinggi, yang menggambarkan perjalanan jiwa ke arah kesempurnaan; 6) Karaton sebagai *Cultuur historische instelling* (lembaga sejarah kebudayaan) menjadi sumber dan pemancar kebudayaan; dan 7) Karaton sebagai Badan (*juridische instellingen*), artinya karaton mempunyai barang-barang hak milik atau wilayah kekuasaan (*bezittingen*) sebagai sebuah dinasti.

Dimensi-dimensi karaton sebagaimana dipaparkan di muka rupanya sulit terpenuhi sepenuhnya oleh karaton Kasunanan Surakarta. Sejarah menjelaskan upaya-upaya pencerabutan karaton dalam hal kekuasaan politik. Pemerintah Kolonial Belanda melucuti kekuasaan karaton melalui pendirian dua karaton baru di luar Kasunanan, yakni Hamengku Buwono di Jogjakarta dan Mangkunegaran di sebelah utara karaton Kasunanan. Di wilayah karesidenan Surakarta sendiri kekuasaan Kasunanan harus berbagi dengan Mankunegaran. Pelucutan berikutnya yang semakin membuat kekuasaan karaton tinggal simbol berjalan seiring tegaknya Indonesia sebagai kesatuan *nation-state* pada masa kemerdekaan. Kekuasaan itu kini dipegang oleh negara dan pemerintahannya. Praktis secara politik, sebagaimana kebanyakan karaton di Nusantara, karaton Surakarta tidak memiliki kekuatan untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat sekelilingnya.

Solo pasca reformasi diperparah oleh makin hilangnya pamor karaton karena konflik perebutan tahta kakak beradik, Hangabehi dan Tedjowulan yang berlangsung antara 2004-2005. Perpecahan di Karaton Surakarta pascameninggalnya Paku Buwono XII ini telah melahirkan raja kembar, Paku Buwono XIII Tedjowulan dan Paku Buwono XIII Hangabehi. KGPH Tedjowulan dinobatkan sebagai Paku Buwono (PB) XIII pada 31 Agustus 2004, sedangkan KGPH Hangabehi dinobatkan pada hari ini 10 September 2004. Keduanya melakukan hal yang sama dengan gelar yang sama pula. Bedanya Hangabehi tinggal di Istana Karaton Surakarta, sementara Tedjowulan tinggal di luar istana.

Perebutan kekuasaan antara kakak dan adik dari ibu yang berbeda tersebut sebenarnya tidak perlu sampai terjadi, apabila keduanya mau membuka hati. Lazimnya, menurut Bakdi Soemanto, pola regenerasi karaton yang memberi hak kekuasaan kepada putra tertua raja yang telah turun tahta atau mangkat, seharusnya dapat dipahami secara utuh. Dalam hal ini, apabila alasan yang dikemukakan adalah kapabilitas pribadi, maka sudah semestinya raja didampingi dalam tugas kepemimpinannya. Tedjowulan yang memiliki latar belakang militer mengklaim bahwa dirinyalah yang pantas menggantikan ayahnya. Namun sayangnya hal

tersebut tidak dapat dengan mudah diwujudkan di lingkungan kraton karena kentalnya kepentingan pribadi atau kelompok.¹³

Dua raja kembar putera mendiang Paku Buwana XII pada akhirnya bertemu pada 29 Agustus 2005. Kesediaan Hangabehi dan Tedjowulan untuk bertatap muka secara langsung tersebut, menurut Luthi Luhbianto, tidak terlepas dari usaha Kapolwil Surakarta, Kombes Abdul Madjid dan Danrem Surakarta Kolenel Tisna Koswara. Menurut Wadir Intelkam Polda Jawa Tengah ini, Abdul Madjid yang membujuk Hangabehi agar bersedia menemui Tedjowulan. Sementara Tisna yang melakukan lobi terhadap Tedjowulan.¹⁴

Dalam masyarakat tradisional, kerajaan atau kraton adalah panutan utama bagi rakyat yang dinaunginya. Sosok raja adalah yang paling dipuja dan dijunjung tinggi. Namun, seiring perkembangan zaman, kraton sudah tidak lagi diletakkan sebagaimana fungsi dan kedudukan yang dimiliki sebelumnya. Dalam konteks Kraton Surakarta, para petingginya bahkan telah lama mengalami kelunturan kharisma, karena gaya hidup yang tidak patut diteladani.

3. Konflik Islam-Kristen

Kelompok-kelompok Islam baru yang lahir pasca reformasi, sebagaimana disebutkan pada bagian terdahulu, menunjukkan kecenderungan radikalisasi dalam isu-isu keagamaan. Salah satu isu penting yang muncul dalam konteks Solo adalah masalah kristenisasi. Kontestasi islamisasi-kristenisasi pada masa-masa sebelum reformasi umumnya masih berada di bawah permukaan. Namun bersamaan dengan merebaknya gerakan radikal itu, kontestasi dan bahkan konflik Islam-Kristen mulai mengemuka secara terbuka. Setidaknya ini dapat dilihat dari beberapa peristiwa, antara lain kasus Pendeta Wilson, kasus pemutaran film oleh LPMI, kasus rumah ibadah pendetan Syarif Hidayatullah, dan pembubaran warung murah peduli kasih.

Konflik antara anggota sejumlah ormas Islam bersama dengan mahasiswa Muslim yang tergabung dalam Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS) dan sejumlah anggota masyarakat non-Muslim yang didukung oleh satgas PDI Perjuangan hampir terjadi ketika ormas Islam tersebut melakukan mosi pada Pendeta Wilson dalam acara dialog interaktif dengan tema "Usaha Mengatasi Konflik Antarumat Beragama" yang disiarkan oleh Radio PTPN Rasitania Surakarta, 3 Maret 2000. Dialog interaktif yang dipandu oleh Jeffrey Ohio, salah satu penyiar radio tersebut, menghadirkan narasumber Pendeta Ahmad Wilson dari Surakarta. Mosi terhadap Pendeta Ahmad Wilson dipicu oleh pernyataannya di dalam dialog tersebut bahwa sebelum menjadi Muslim,

¹³ Gatra.com, 31 Agustus 2005

¹⁴ Tempointeraktif, 30 Agustus 2005

Nabi Muhammad adalah pemeluk agama Kristen. Pendeta Wilson kemudian diadukan ke Polisi oleh sejumlah tokoh Muslim dan Anggota DPRD dari PPP, PKB, PK, dan PAN, sehingga radio tersebut terpaksa berhenti mengudara beberapa hari karena sebagian peralatannya disita oleh Polisi sebagai barang bukti.

Pada Minggu 29 April 2001, Laskar Hizbullah Surakarta mendatangi sebuah stasiun radio. Rombongan laskar Laskar Hizbullah Surakarta yang dipimpin komandannya, Yani mendatangi stasiun radio PTPN Rasitania, Solo, Jawa Tengah. Laskar Hizbullah Surakarta, yang menyebut dirinya Divisi Sunan Bonang adalah salah satu kelompok Islam radikal di Solo yang kerap melancarkan aksi-aksi kekerasan.

Mereka datang ke radio itu meminta klarifikasi soal pemutaran film berjudul Patriot yang tiketnya di jual oleh radio swasta itu. Menurut Yani, pemutaran film yang dibintangi aktor Hollywood asal Australia Mel Gibson itu dibarengi pula dengan pembagian angket kuis dan kaset yang berisi ajaran agama Kristen kepada setiap pengunjungnya. Acara bertajuk "Show untuk Pelajar dan Mahasiswa" di bioskop Fajar Baru yang diputar Kamis, 26 April 2001 itu ditafsirkan sebagai kegiatan terselubung untuk memengaruhi keyakinan agama yang dipeluk umat lain.

"Berdasar aturan, tindakan ini jelas tidak bisa dibenarkan. Bila dibiarkan bisa menimbulkan keresahan, karena ada suatu upaya untuk memengaruhi keyakinan orang lain. Apalagi, kaset dan kuis itu disebarluaskan kepada sembarang orang, yang mungkin saja memiliki keyakinan berbeda," ujar Komandan Hizbullah.¹⁵

Kelompok Hizbullah datang berseragam lengkap ala militer dengan menumpang tiga buah kendaraan jip, dan puluhan sepeda motor berangkat dari markasnya, Tegalsari sekitar pukul 09.00 dan tiba di lokasi sekitar 09.15. Direktur radio PTPN, Budiyoko yang sudah berpengalaman menghadapi kelompok sejenis menemui mereka. Di luar gedung, satu truk pasukan polisi bersenjata lengkap terlihat berjaga-jaga memantau situasi. Budiyoko menjelaskan bahwa bukan hanya radionya saja yang ikut menjual tiket *special show* itu, tetapi masih ada enam stasiun radio lain yang juga dititipi oleh Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI), yang memiliki hajat pemutaran film itu. LPMI adalah lembaga gereja Kristen Protestan yang mengkhususkan pembinaan religius pada mahasiswa dan anak-anak muda. Bekerjasama dengan Fajar Theater, mereka membuka *ticket box* pada beberapa stasiun radio swasta. Selebar tiket dijual seharga Rp 2.500.

Senin 30 April 2001 sekitar pukul 23.00, sejumlah petugas polisi mendatangi Kantor Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI) di Kampung Guasari, Jebres, Solo. Dari lokasi tersebut, polisi menyita tujuh kardus berisi kaset dan satu bungkus kertas kuis, yang merupakan barang-

¹⁵ <http://www.minihub.org/siarlist/msg04951.html>, 2009.

barang sisa dari kegiatan organisasi keagamaan itu. Petugas hanya menyita barang, sedangkan para aktivisnya yang kebetulan berada di tempat itu, tidak diganggu gugat. Pada malam itu di sekitar masjid Jl Honggowongso telah berkumpul ratusan orang dari berbagai kelomok-kelompok Islam garis keras. Mereka berencana menyerang Kantor LPMI di Guasari, belakang tempat pembakaran abu jenazah Tiong Ting, Jebres.

Dengan ditemani beberapa orang anggota laskar Hizbulah sekitar 120 anggota polisi mendatangi LPMI. Polisi mengerahkan sekitar 120 orang personil untuk penyitaan barang-barang itu. Apa yang dilakukan LPMI sebenarnya bukan pelanggaran hukum pidana. Namun, karena situasi sosial-politik yang keruh, hal seperti ini bisa menjadi problem sosial-politik yang serius. Kelompok-kelompok Islam garis keras yang memiliki interest politik bebas melakukan tindak kekerasan untuk hal-hal seperti ini di Indonesia. Menurut Polisi Solo, pijakan hukum untuk menjerat pelaku yang terlibat dalam kegiatan itu, sangat lemah. Acuanya hanya SK Menteri Agama, No 70 tahun 1978 dan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri. Adapun sanksinya paling banter hanya teguran untuk membubarkan atau menghentikan kegiatan. Menghadapi tekanan dan ancaman kekerasan ini, LPMI Solo meminta maaf. Pernyataan maaf ini disampaikan Koordinator LPMI Solo, Prayitno Dwi Nugroho dan mantan aktivis organisasi itu, Andreas Arianto.

Pada malam 3 September 2005, puluhan orang yang tergabung dalam Forum Koalisi Umat Islam Surakarta mendatangi rumah tinggal seorang pendeta, Syarif Hidayatullah, di bilangan Madegondo, Grogol, Sukoharjo. Mereka menyegel rumah berlantai tiga yang masih dalam tahap pembangunan itu, karena si pemilik *ngotot* hendak mendirikan gereja di kawasan warga Muslim. Syarif memang mengajukan izin membangun gereja. Izin belum keluar, tapi ia tetap melanjutkan pembangunan rumah ibadah.¹⁶

Poltabes Surakarta meminta kepada pengurus Gereja Kristen Jawa (GKJ) Manahan di Kota Solo untuk menghentikan program penjualan paket buka seharga Rp 500. Alasannya demi menjaga kondusivitas karena ada sejumlah elemen masyarakat yang tidak setuju dengan kegiatan tersebut. Alasannya pihak kepolisian menerima banyak masukan dan desakan dari sejumlah kalangan Muslim yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap acara yang telah dilakukan selama 13 tahun terakhir. Kepada wartawan, dengan bergurau Pendeta Ratih menyatakan ini adalah perjamuan terakhir. Selanjutnya dengan mimik serius dia mengatakan akan mengupayakan bentuk-bentuk lain untuk mengungkap rasa

¹⁶ Gatra no. 44, Senin, 12 September 2005

kerukunan beragama dan santunan kemanusiaan bagi warga tidak mampu.¹⁷

Radikalisme Keagamaan Pasca Reformasi

Runtuhnya pemerintahan Orde Baru oleh gerakan reformasi di bawah kepemimpinan M. Amien Rais dan dukungan luar biasa mahasiswa dan segenap lapisan masyarakat, menengarai dimulainya krisis multi dimensi yang tak terbantahkan. Sebelum jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998, negeri ini sudah diterpa krisis ekonomi. Tak terbantahkan bahwa hampir dalam satu dekade terakhir, negara ini mengalami setidaknya empat akumulasi krisis besar yang tidak berdiri sendiri, namun memiliki dinamika sosial dan politik yang saling terkait. Krisis Timor Timur yang banyak mendominasi diplomasi politik internasional dan banyak menyita perhatian para pemimpin Indonesia. Krisis kesatuan nasional dan fragmentasi teritorial, di mana ancaman tersembunyi seperti tuntutan referendum pemisahan Aceh dari NKRI, membuktikan sesuatu yang jauh lebih sulit dan serius daripada kehilangan Timor Timur. Krisis demokratisasi dan kegamangan transisi dari pemerintahan otoriter Soeharto ke pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel di mata rakyat, di mana para pialang kekuasaan dari rejim lama masih memiliki cukup kekuatan untuk kembali dalam banyak penampakan dan wajah, serta menghambat perubahan sosial dan politik yang efektif. Dan krisis ekonomi berkepanjangan yang dimulai pertengahan tahun 1997.

Situasi kaotik kejatuhan rezim otoriter Soeharto dan reformasi yang membuka angin segar bagi kebebasan dan keran demokrasi yang lebih besar, tampaknya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok keagamaan yang dulu bergerak di bawah tanah untuk muncul ke permukaan. Kelompok-kelompok keagamaan baru ini menyempal dari moderasi arus utama yang selama ini didominasi oleh Muhammadiyah dan NU dan ormas-ormas keagamaan lainnya yang lebih kecil. Kelompok-kelompok ini juga memandang kekuatan Islam arus utama itu kurang greget dalam menghadapi tantangan-tantangan baru yang datang dari luar dan mengancam Islam dan kaum Muslim. Mereka biasanya secara wacana mengambil bentuk pemikiran fundamentalis dan radikal serta alergi dengan semua jenis persentuhan atau pergulatan wacana yang datangnya dari luar (baca: Barat). Isu-isu yang datangnya dari Barat ditanggapi oleh mereka dengan mengembangkan *ghazwul fikri*, perang wacana antara Islam *vis a vis* Barat. Secara gerakan, aksi-aksi mereka juga mengalami radikalisasi yang sangat kuat. Sebagian dari mereka radikal namun tanpa mempergunakan kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuan ideologis, dan sebagian lainnya menghalalkan sarana-sarana kekerasan untuk meraih capaian-capaian ideologis mereka sendiri. Radikalisme kekerasan ini bukan hanya ditujukan kepada Barat dan kaki tangannya, namun juga terhadap sesama Muslim yang diduga mereka

¹⁷ Detiknews, 28 Agustus 2009

sebagai kaum liberal dan pendukung gagasan-gagasan Barat. Mereka juga tak segan menyerang kelompok-kelompok Muslim moderat yang mengambil jalan kooperatif dengan Barat dalam kerangka dialog. Kekuatan-kekuatan *civil* Islam yang memperoleh kucuran dana dari pemerintah maupun yayasan-yayasan swasta asing juga tidak lepas dari serangan mereka.

Proses radikalisasi yang semakin mengeras ini tentu saja tidak dapat dilepaskan dari konteks zaman yang mereka hadapi. Mereka sedang menghadapi ketegangan-ketegangan global pasca modernisme dan developmentalisme, yakni benturan globalisasi (fundamentalisme pasar) dengan fundamentalisme agama, dan benturan antar peradaban.

Kelompok-kelompok radikal utama yang muncul dalam konteks nasional meliputi Darul Islam,¹⁸ Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam, dan Laskar Jihad. Dalam konstelasi lokal Solo, di samping kelompok-kelompok di atas terdapat juga kekuatan-kekuatan radikal lain seperti Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), laskar-laskar lain, Forum Komunikasi Aktivistis Masjid (FKAM) dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), sebuah organisasi baru yang didirikan oleh Abu Bakar Ba'asyir setelah pengunduran dirinya dari MMI. Kelompok-kelompok di atas mempunyai persinggungan kepentingan dalam kerangka perjuangan menegakkan syariat Islam.¹⁹ Mereka mempunyai kepedulian serupa agar negara memerhatikan dan menerapkan lebih serius syariat Islam, demikian juga masyarakat Muslim. Pandangan ini setidaknya berdasarkan tiga faktor utama—teologis, demografis, dan sosio-politik. Faktor pertama menekankan bahwa Islam dipandang sebagai agama yang menawarkan petunjuk dan solusi bagi semua aspek kehidupan sosial, kultural, ekonomi, politik, dan lain-lain. Pandangan ini membawa mereka pada keyakinan bahwa semua Muslim wajib mendasarkan semua bidang kehidupannya pada nilai-nilai dan ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam syariat. Faktor kedua merujuk pada fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim (87%). Bagi mereka ini merupakan kenyataan bahwa Islam harus berfungsi sebagai legitimasi sosio-kultural dan politik, basis negara, atau setidaknya mengakui syariat Islam sebagai materi inti atau bagian integral dari konstitusi. Faktor ketiga menunjukkan bahwa hukum sekular positif tidak membawa pada perbaikan sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik bagi Muslim.²⁰ (Effendi, 2003: 218-219). Meskipun organisasi-organisasi Islam baru ini mempunyai kepedulian sama, bukan berarti dapat disimpulkan bahwa mereka sepakat

¹⁸ Menurut al-Chaidar, seorang aktivis dan pemimpin salah satu dari delapan faksi dalam jaringan Darul Islam, organisasi ini didukung oleh 15.000 pengikut yang kembali dari Afghanistan setelah pertempuran panjang Mujahidin melawan Uni Soviet (*The Straits Times*, 27 September 2001).

¹⁹ Cita-cita menegakkan syariat Islam di Indonesia tidak semata diperjuangkan oleh MMI, FPI dan Laskar Jihad, beberapa organisasi keislaman lainnya yang juga ikut berpartisipasi dalam gerakan ini adalah Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Hizbut Tahrir, Hamas, Ikhwanul Muslimin, KISDI, dan Front Hizbullah.

²⁰ Effendi, Bahtiar. *Islam and the State in Indonesia*. Singapore: ISEAS, 2003.h.218-219

dalam semua aspek yang berkaitan dengan implementasi syariat Islam. Mereka masih memiliki perbedaan substansial dalam masalah ini. Singkatnya, ini disebabkan karena isu syariat Islam tidak pernah didiskusikan dan diekspos secara detail, misalnya apa yang disebut syariat Islam, bagaimana memahaminya dan menafsirkannya, tafsir mana yang harus diikuti, dan bagaimana diaplikasikan, dan seterusnya.

Majelis Mujahidin Indonesia adalah kelompok garis keras yang dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir. Abu Bakr Ba'asyir adalah penerus kepemimpinan Abdullah Sungkar di pondok pesantren al-Mukmin, Ngruki Sukoharjo, sebuah desa satelit Surakarta. Keduanya pernah sama-sama melarikan diri ke Malaysia pada tahun 1985 karena represi pemerintahan Orde Baru saat itu. Pondok pesantren yang mereka pimpin disinyalir sebagai salah satu tempat yang dicurigai sebagai sumber sosial dari beberapa gerakan teroris di negeri ini.

MMI di bawah Abu Bakar Ba'asyir memandang kondisi pemerintahan di bawah Megawati amat rentan. Majelis ini mendorong dan mendukung sepenuhnya penetapan syariat Islam. Para anggotanya menghendaki agar Piagam Jakarta ditetapkan kembali sebagai konstitusi. Sebagian besar anggota MMI adalah mantan aktivis Islam yang pada masa Orde Baru mempunyai keberanian politik menolak pemberlakuan Pancasila sebagai asas tunggal sejak tahun 1985. Mereka berkeyakinan bahwa syariat Islam adalah solusi bagi semua kompleksitas persoalan bangsa. Orientasi ini mendorong upaya penggalangan massa untuk dukungan moral dan material dari segenap unsur Islam, nasional, regional, bahkan internasional demi kepentingan penegakkan syariat Islam. Program politik yang terkait langsung dengan proses ini adalah membangun kekuatan politik Islam dengan mendesak partai-partai Islam bersatu padu memperjuangkan syariat Islam, menciptakan pemerintahan Islam yang menjamin pelaksanaan syariat Islam, dan memiliki media massa untuk menyebarluaskan program MMI (Risalah Keputusan Kongres MMI, 2001). Abu Bakar Ba'asyir berpandangan bahwa pilihan MMI adalah "berlakukan syariat Islam, atau kami mati di atas jalan Jihad fi Sabilillah". Menurut keyakinan mereka, sebagaimana diungkapkan oleh Abu Muhammad Jibril Abdurrahman dalam ceramah kongres Mujahidin, mujahid kontemporer yang harus diteladani semangatnya adalah Osama bin Laden dan Abdullah Azzam.²¹

Penegakkan syariat Islam di Indonesia juga merupakan orientasi perjuangan utama Front Pembela Islam (FPI) yang populer di beberapa kota besar termasuk di Surakarta. Hingga 2001, Habib Muhammad Rizieq mengklaim kelompok ini memiliki 5 juta anggota dengan 17 cabang. Setelah insiden Monas 1 Juni, FPI ditengarai mengalami penurunan. Mereka biasa dikenal sebagai polisi syariat karena tindakan-tindakan kekerasan dalam memerangi tempat-tempat hiburan dan tempat lainnya yang dipersepsi sebagai sumber kemaksiatan. Di

²¹ Prasetyo, Eko. *Membela Agama Tuhan: Potret Gerakan Islam dalam Pusaran Konflik Global*. Yogyakarta: Insist Press, 2003. h.100

Solo, sasaran aksi mereka tidak semata tempat-tempat hiburan dan maksiat, bahkan juga para aktivis dan gerakan politik beraliran kiri.

Kelompok radikal lain adalah Laskar Jihad. Laskar Jihad merupakan organisasi Islam radikal yang terorganisir dan paling menonjol. Solo adalah lahan subur bagi bersemainya benih-benih laskar dan gerakan-gerakan radikal keagamaan lainnya, seperti Laskar Hizbullah Sunan Bonang, Laskar Jundullah, Laskar Zilfikar, Laskar Salamah, Laskar Teratai Emas, Laskar Honggo Dermo, Laskar Hamas, Laskar Hawariyyun, Barisan Bismillah, Gerakan Pemuda Ka'bah, Brigade Hizbullah, dan Majelis Ta'lim al-Islah.

Laskar Jihad pada awalnya merupakan reaksi keras atas konflik Ambon dan Maluku di mana banyak kaum Muslim tewas terbunuh dalam perang saudara berbasis keagamaan. Di bawah kepemimpinan Ja'far Umar Thalib, Laskar Jihad Ahlus Sunnah wal Jamaah dideklarasikan pada 6 April 2000. Pada tahun yang sama, Laskar Jihad mengirim sekitar 5.000 pasukan milisi ke Maluku, di mana mereka dipandang menjadi salah satu alasan konflik panjang di kawasan timur Indonesia ini. Pada saat yang sama pemerintah tidak melakukan pencegahan pengiriman milisi Laskar Jihad, bahkan mereka diberikan latihan oleh TNI sebelum berangkat. Konflik berdarah di Maluku sejak 1999 ini telah memakan korban antara 6.000 hingga 9.000 jiwa, dan ratusan ribu pengungsi (International Crisis Group Report, no. 10, 19 Desember 2000). Mereka juga memainkan peran dalam konflik Poso. Alasan mereka terlibat langsung dalam konflik ini karena aparat keamanan tidak begitu efektif memberikan perlindungan.

Aktivitas Laskar Jihad tidak semata pengiriman pasukan di wilayah-wilayah konflik, pun menyelenggarakan layanan pendidikan, layanan kesehatan dan sosial secara cuma-cuma. Di samping itu, mereka juga bersama-sama FPI melakukan penggrebekan tempat-tempat hiburan dan maksiat, utamanya pada bulan Ramadhan di Solo dan Ngawi. Di Solo, aksi mereka hampir saja menyulut konflik horizontal karena berhadapan dengan para preman yang dibayar oleh para pemilik tempat hiburan seperti cafe, pub, diskotik, dan lain-lain. Pemerintah pusat telah menuai kritik karena tidak melakukan upaya pencegahan bagi para aktivis Laskar Jihad. Sebagian analis menduga bahwa pemerintah memberikan respon sekedarnya karena takut dituduh sebagai anti-Islam.

Kebijakan *counter attack* atas kaum teroris oleh Amerika semakin menekan Indonesia karena kehadiran Laskar Jihad dan anggotanya terus bertambah antara 300-400 orang sejak peristiwa 11 September kelam. Popularitas Laskar Jihad lebih disandarkan pada kemampuannya untuk mendukung Muslim dalam konflik, seperti di Maluku. Organisasi ini juga menyediakan rasa identitas Islam yang sangat kuat. Keluarga-keluarga muda yang berjuang di Maluku juga menerima gaji yang disokong oleh aktivitas-aktivitas seperti ekspor garmen. Krisis ekonomi berkepanjangan telah membuat organisasi-organisasi semacam ini semakin menonjol.

Pada 19 September 2003, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengikuti pertemuan Presiden Megawati dengan Presiden Bush, pernah mengajak kaum Muslim untuk bersatu dan bergabung melakukan jihad terhadap AS dalam peristiwa serangan atas Afghanistan. Ajakan serupa juga pernah dikeluarkan oleh Laskar Jihad, Laskar Jundullah dan FPI. Klaim-klaim semacam ini kemudian diperlunak. Sekretaris umum MUI Dien Syamsuddin, ketika ditanya tentang jihad sebagai perjuangan bersenjata, ia menjawab bahwa istilah ini memiliki banyak makna dan bentuk perjuangan, termasuk di dalamnya perjuangan damai. Ia mengutuk tindakan-tindakan *sweeping* warga negara AS di Indonesia, seperti yang terjadi di Surakarta.

Sweeping terhadap warga negara Amerika di Surakarta dilakukan oleh Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS). Mereka menyatakan bahwa target *sweeping* adalah agar orang-orang Amerika tidak terlalu banyak campur tangan dalam urusan Indonesia. Pemberlakuan syariat Islam menjadi persoalan umat Islam sendiri dan biarlah hal itu berproses sendiri. Pada bulan Ramadhan mereka konvoi berkeliling kota yang tujuannya untuk menyerukan anti Amerika, dan mengingatkan pemilik-pemilik tempat-tempat hiburan agar tidak menyelenggarakan acara yang berbau maksiat selama bulan suci.²²

Walaupun gerakan-gerakan ormas Islam radikal dan protes anti-Amerika terus tumbuh, tetapi mereka tidak memperoleh cukup dukungan dari mayoritas penduduk Indonesia, termasuk masyarakat Surakarta. Sebagian besar penduduk Muslim Indonesia adalah moderat dan toleran. Pandangan dan praktik moderat ini diungkapkan oleh sebagian pemimpin Islam. Syafii Maarif, ketua umum Muhammadiyah, mengatakan bahwa Muslim Indonesia harus fokus pada problem rakyat Afghan, daripada menyerang warga Amerika.²³ Bagaimanapun, serangan Amerika dan Inggris terhadap Afghanistan telah terjadi, dan demonstran di seluruh Jawa dan beberapa wilayah lain meluas.

Masa Depan Konflik: Terorisme dan Isu Agama

Serangan 11 September 2001 merupakan titik tolak hubungan-hubungan internasional yang timpang. Bangkitnya Islam radikal dan terorisme internasional telah memanifestasikan diri mereka di berbagai belahan dunia selama beberapa dekade. Pada awalnya, fenomena ini mewujudkan diri dalam bentuk polarisasi pada tingkat nasional, kemudian tumbuh menjadi gerakan internasional yang memperoleh pijakan secara praktis di seluruh penjuru dunia. Penyebarluasan Islam radikal dan terorisme yang terkait merupakan ekspresi kecenderungan menuju globalisasi yang telah sedang berkembang dalam waktu yang agak lama. Ketegangan-ketegangan antara aktor-aktor dan kepentingan-kepentingan Barat dan non-Barat juga bukan merupakan hal baru.

²² Fananie, Zainuddin et.al. *Radikalisme Keagamaan dan Perubahan Sosial*. Surakarta: Muhammadiyah University Press dan The Asia Foundation, 2002.h.107

²³ The Jakarta Post, 2 Oktober 2001

Sebagai reaksi berlebih atas peristiwa 11 September di muka, Barat – Amerika Serikat dan Inggris – mencanangkan *war against terrorism*. George W Bush sebagai panglima perang melawan terorisme internasional menunjukkan retorika kurang lebih sama dengan gaya retorika Osama bin Laden, dan dapat dikatakan bahwa dua tokoh ini sama-sama berambisi dan berkompetisi untuk saling mempersetankan satu sama lain. Pada hakikatnya keduanya menyajikan wajah fundamentalisme. Bush mewakili fundamentalisme Kristen, dan Osama merupakan representasi fundamentalisme Islam. Wajar bila Tariq Ali menyebut wacana dan aksi terorisme versus perang melawan terorisme lebih cocok disebut sebagai pertarungan antara dua kekuatan fundamentalisme (*the clash of fundamentalisms*).²⁴ Benjamin R. Barber menyebutnya dengan *Jihad versus McWorld*.²⁵

Arundhati Roy secara kritis menyatakan bahwa Bush dan Osama adalah dua tokoh yang sama-sama mempergunakan gaya bahasa keagamaan dan mengatasmakan Tuhan serta retorika perang antara “kebaikan dan kejahatan”.

Jihad, sebagaimana globalisasi pasar dan ideologi “komfortismus”, kini memasuki fase baru di mana ia telah menjadi fenomena global sekaligus sebagai agen globalisasi. Jaringan global jihad telah terintegrasi di dalam regim keamanan global yang dipimpin oleh Amerika. Agak sulit untuk mengatakan di mana satu bentuk integrasi berakhir dan bentuk lainnya baru mulai, karena sedemikian lekat keduanya terkoneksi dalam proses globalisasi itu sendiri. Ada perbedaan besar dalam tujuan dan organisasi antara pasar dan jihad, namun keduanya bersama-sama merupakan agen globalisasi. Keduanya memunculkan dua macam jaringan global—satu teror dan lainnya adalah “keamanan”, meminjam istilah pemerintah Amerika. Karena jihad, Islam kini menjadi agen sekaligus produk dari globalisasi. Sebagaimana Amerika, Islam telah menjadi fenomena global pasca 11 September 2001, bukan hanya sebagai agama dengan berjuta-juta pengikut, namun juga telah menjadi kosakata harian setiap orang di berbagai penjuru dunia. Meskipun ada kebencian Barat atas serangan itu yang diarahkan kepada Islam, pada saat yang sama banyak pula orang di Barat tertarik untuk mengenal lebih jauh Islam, yang pada akhirnya juga menguntungkan karena Barat kini menjadi rumah bagi Muslim. Berterima kasih kepada serangan September kelam itu, banyak orang kini merasa memiliki tanggung jawab untuk mendiseminasikan citra baru tentang Islam yang baik, bersahabat, dan bersahaja yang menjadi oposan bagi jihad ala al-Qaeda sendiri. Banyak stasiun-stasiun radio lokal di Amerika mendiskusikan berbagai makna teologis jihad. Sesuatu yang mengejutkan adalah bahwa para presenter dan pemirsa Amerika memiliki informasi yang lebih baik tentang aspek-aspek tertentu dari Islam daripada Muslim sendiri. Fakta ini didukung dengan

²⁴ Ali, Tariq. *The Clash of Fundamentalisms: Crusades, Jihads and Modernity*. London, New York: Verso, 2002.h.31

²⁵ Barber, Benjamin R. *Jihad vs McWorld: How Globalism and Tribalism Are Reshaping the World*. New York: Ballantine Books, 1995.h.23

peningkatan secara dramatis penjualan al-Qur'an dan buku-buku lain tentang Islam setelah serangan itu terjadi. Islam menjadi fenomena Amerika, dan bahkan bagian dari kebudayaan global.²⁶

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah koneksi Indonesia dan Timur Tengah. Ada tiga fase gelombang globalisasi dalam hubungan dan koneksi antara ulama dan pelajar Nusantara dengan agamawan dan ulama di Haramayn sejak abad ke 17 hingga kini (Azra dalam Meuleman).²⁷ Gelombang pertama - abad 17-18 – telah membawa pengaruh besar bagi perubahan orientasi wacana keislaman dari tasawuf ke orientasi yang lebih syariah. Gelombang kedua terjadi pada akhir abad 19. Pada masa ini banyak jamaah haji dan wisatawan yang pulang dari tanah suci tidak hanya menyebarkan semangat pan Islamisme bahkan yang paling penting adalah mendistribusikan berbagai literatur Islam. KH. Hasyim al-Asy'arie dan KH. Ahmad Dahlan merupakan dua tokoh yang membawa dan menyebarkan ide-ide pembaruan yang mereka baca dari al-Manar, al-Urwatul Wutsqa atau memperoleh langsung dari guru-guru mereka di Haramayn. Gelombang ketiga terjadi selama dekade-dekade awal abad 20. gelombang baru ini banyak disebut oleh para sarjana sebagai gelombang "modernisme Islam" yang bukan hanya berasal dari tanah suci namun juga Kairo, Mesir. Gerakan ini berutang pada jasa Muhammad Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh, dan mengkristalkan diri dalam gerakan-gerakan puritan Islam semacam Muhammadiyah, al-Irsyad dan Persis.

Gelombang kontemporer kontak dan relasi intelektual antara Timur Tengah dan Indonesia mencapai suatu kebangkitan yang belum pernah terjadi pada masa-masa terdahulu, mulai terjadi pada dekade 80-an. Momentumnya adalah Revolusi Islam di Iran yang berhasil menumbangkan rezim Reza Pahlevi oleh Ayatullah Khomeini. Sejak revolusi ini banyak buku-buku yang ditulis oleh intelektual maupun ulama Iran diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Melihat adanya gelombang transfer intelektual melalui penerjemahan-penerjemahan karya-karya Iran ini, kelompok-kelompok Sunni-Salafi dan Wahhabi khususnya, merasa khawatir akan penyebaran ajaran-ajaran dan praktik-praktik keagamaan Syiah. Terdorong untuk menandingi kecenderungan ini, Arab Saudi menyediakan berbagai insentif penerjemahan karya-karya ulama Sunni - utamanya mereka yang beraliran Wahhabi - ke dalam bahasa Indonesia. Arab Saudi juga menyokong kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia untuk menjadi agen bagi paham Wahhabi, yang memiliki tujuan ganda, yakni untuk melawan pemikiran-pemikiran Syiah sekaligus pemikiran-pemikiran keislaman yang dituduh "sekular" dan "liberal". Contoh dari kelompok atau organisasi keagamaan semacam ini adalah DDII (Dewan Dakwah Islamiah Indonesia), sebuah organisasi yang memiliki hubungan kuat

²⁶ Devji, Faisal. *Landscapes of the Jihad: Militancy, Morality, Modernity*. London: Hurst & Company, 2005.h.55

²⁷ Meuleman, Johan ed. *Islam in the Era of Globalization: Muslim Attitudes Towards Modernity and Identity*. Jakarta: INIS, 2001.h.38-40

dan didanai oleh Rabithah `Alam Islami. Pada dekade-dekade ini pula disaksikan betapa banyak pelajar dan mahasiswa Muslim Indonesia yang belajar di Kairo semakin terperangkap ke dalam jebakan fundamentalisme.²⁸

Konteks global itu dapat dirasakan di Surakarta. Sejak peristiwa Bom Bali, nama Abu Bakar Ba`asyir dikait-kaitkan dengan Jamaah Islamiyah. Faktor lain adalah Fathur Rohman al-Ghozi, mantan murid Ba`asyir. Ia ditangkap di Manila pada 15 Januari 2002, divonis 17 tahun, tapi berhasil melarikan diri dari penjara pada 14 Juli 2003. Akhirnya ia tewas tertembak di Mindanao bulan Oktober 2003. Ia dituduh menyimpan satu ton bahan peledak dan merencanakan serangan di Manila dan Singapura. Semua ini menyeret Pondok Pesantren al-Mukmin, Ngruki, Sukoharjo, di mana al-Ghozi pernah nyantri. Pesantren ini dituduh sebagai "School of Jihad" dan tempat latihan teroris karena salah satu pendirinya adalah Abu Bakar Ba'asyir, yang didakwa sebagai pemimpin Jaringan Islamiyah, meskipun dakwaan ini terbukti salah di pengadilan. Sejak saat itu, aktivitas Abu Bakar Ba'asyir di MMI mulai dipandang sebagai bentuk baru reorganisasi terorisme.

Ada pernyataan resmi pejabat pemerintah tentang hubungan antara kelompok-kelompok di Indonesia dan teroris Asia Tenggara dan atau organisasi separatis, meski bukti-bukti untuk kasus ini sama sekali tidak memadai. Tenggara ini sudah muncul jauh sebelum tragedi WTC, dan fakta lapangan menunjukkan serangkaian teror di antaranya dialamatkan pada beberapa gerakan Islam radikal. Kelompok Mujahidin Malaysia (KMM) di samping Front Pembebasan Islam Moro (MILF) mulai ditempatkan sebagai bagian dari jaringan al-Qaidah. Penangkapan sejumlah WNI di beberapa negara mulai marak dilakukan dengan tuduhan tersangkut jaringan teroris ini. Mereka yang tertangkap ini beberapa di antaranya mengaku pernah terlibat dalam sejumlah pemboman dan aktif memberikan latihan militer di sejumlah wilayah konflik seperti Poso dan Ambon.

Peringatan dini tentang semakin meningkatnya militansi Islam di Asia Tenggara telah disampaikan Amerika sejak 1999. Militansi Islam ini dapat menciptakan peluang besar jaringan teroris transnasional untuk rekrutmen anggota berpotensi. Kedutaan AS di Jakarta telah menerima sinyal sejak Agustus 2001 setelah menerima laporan intelijen Eropa tentang ancaman bom atas duta besar AS untuk Indonesia oleh seorang berkebangsaan Sudan yang memiliki hubungan dengan jaringan al-Qaidah.²⁹

Mahasiswa-mahasiswa Indonesia sudah lama belajar di sekolah-sekolah keagamaan di Pakistan dan tempat lainnya, dan jumlahnya semakin meningkat. Sebagian kecil dari mereka tertarik dengan ajaran-ajaran radikal sebagaimana keyakinan Taliban, dan bergabung dengan Taliban dalam perang sipil di

²⁸ Abaza, Mona. *Cultural Exchange and Muslim Education: Indonesian Students in Cairo*. University of Bielefeld, 1990. h. 75

²⁹ *The Jakarta Post*, 9 Oktober 2001

Afghanistan.³⁰ Kenyataan ini setidaknya memperkuat analisis Mona Abaza seperti yang telah dikemukakan di atas.

Meskipun demikian, organisasi-organisasi fundamentalis Islam di Indonesia menolak keterlibatan dengan al-Qaidah. Ja'far Umar Thalib menentang telah bersama-sama dengan kelompok Mujahidin Afghan selama 1980-an dan bertemu dengan Osama bin Laden, namun tidak membantah bahwa dia sendiri berada disitu. Ia juga menolak adanya Mujahidin Afghan yang terlibat dalam Maluku. Ja'far memandang serangan atas AS sebagai pelajaran bagi Amerika dan ia mendukungnya. Organisasi Islam lain yang diduga memiliki hubungan dengan Osama, MMI, juga menolak hubungan tersebut.³¹

Keberadaan Abu Bakar Ba'asyir, Fathurrohman al-Ghazi dan Pondok Pesantren al-Mukmin, Ngruki, merupakan satu dari sekian fenomena yang menyudutkan Surakarta sebagai hotspot terorisme. Tewasnya Azahari dan Agus Puryanto di Batu, Malang, Jawa Timur menyeret juga nama Surakarta. Ini karena Agus Puryanto tercatat sebagai salah seorang mahasiswa di STAIN Surakarta dan pernah tinggal di Kampung Waringinrejo RT 10/RW 15, Desa Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, selama hampir empat tahun.

Beberapa fakta lain seolah memperkuat citra itu. Tewasnya dua tersangka teroris di Jatiasih, Bekasi, adalah Air Setyawan dan Eko Joko Sarjono. Kedua jenazah diangkut menggunakan mobil dari Jakarta menuju Kampung Brengosan, Laweyan, Solo dengan kawalan ketat petugas polisi. Ratusan pelayat menyambut kedatangan jenazah. Jenazah keduanya dimakamkan berdampingan di pemakaman Muslim Kaliyoso, Kalijambe, Sragen, Jawa Tengah. Abu Bakar Ba'asyir, memimpin upacara pemakaman sekaligus membacakan doa di atas pusaka dua tersangka teroris itu.³²

Selang dua bulan berikutnya, tepatnya pada 17 September 2009, Detasemen Khusus 88 Antiteror berhasil menewaskan Noordin M. Top, tokoh teroris berkewarganegaraan Malaysia, bersama tiga teroris lainnya. Berbeda dari peristiwa tewasnya Air Setyawan dan Eko Joko Sarjono di atas, kejadian ini telah menyadarkan sebagian masyarakat Solo bahwa pembatasan terhadap ruang gerak jaringan teroris tidak cukup dilakukan oleh aparat keamanan, namun masyarakat juga perlu terlibat secara luas. Kesadaran baru itu setidaknya terlihat dari aksi penolakan masyarakat terhadap pemakaman rekan-rekan Noordin M. Top yang ikut tewas dalam penggerebekan di Mojosongo, Jebres, Solo, tiga hari menjelang Idul Fitri tersebut.

Ada pihak yang menyangkan aksi penolakan tersebut seperti yang ditunjukkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Solo. MUI Solo bahkan menilai bahwa penolakan terhadap jenazah tersangka teroris bisa melanggar hak asasi

³⁰ *Tempo*, No. 03/11, 25 September 2001

³¹ *Tempo*, No. 03/11, 25 September-1 Oktober 2001

³² Poskota, 13 Agustus 2009

manusia (HAM) kendati para teroris sengaja melakukan pelanggaran dari sisi HAM.³³

Penolakan masyarakat setelah tewasnya teroris, merupakan indikasi penolakan mereka atas penggunaan modus kekerasan dalam memperjuangkan tujuan-tujuan agama. Di sisi lain, penolakan tersebut juga mengindikasikan ketidaktauan dan ketidakberdayaan masyarakat dalam menghadapi gerakan jaringan terorisme. Masyarakat sadar bahwa selama ini dikelilingi kelompok teroris ketika Densus 88 melakukan penggerebekan.

Fakta penolakan itu terlihat dari munculnya puluhan spanduk yang berisi penolakan penguburan jenazah "teroris" dimakamkan di Solo. Tidak diketahui siapa yang memasang puluhan spanduk yang dicetak dengan *digital printing* dan beberapa spanduk yang menggunakan kain dan cat semprot biasa tersebut. Dua buah spanduk bertuliskan, "Wong Solo Tolak Jasad Teroris", "Tolak Teroris Dimakamkan di Solo". Spanduk-spanduk tersebut terdapat di sepanjang jalan utama Slamet Riyadi, hingga ke utara menuju daerah Mojosongo tempat dilangsungkannya penyerbuan Tim Densus 88 di desa Kepuhsari, Mojosongo, Surakarta.³⁴

Sikap menolak atas terorisme juga ditunjukkan oleh MUI Kota Surakarta. Bekerjasama dengan kepolisian, MUI menggelar tabligh menolak terorisme. Dalam acara tersebut ditegaskan bahwa terorisme tidak bisa dikaitkan dengan Islam. Selain ratusan hadirin, acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh di Solo, seperti Walikota Surakarta Joko Widodo, Kapolwil Surakarta Kombes Pol Ery Subagyo, Kapoltabes Surakarta Joko Irwanto, para anggota DPRD dan lain-lain. Tampil sebagai mubaligh adalah Mudrick M Sangidoe, Pengasuh Pesantren Al-Mukmin Ngruki Ustadz Wahyuddin, dan Ketua Umum Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) Ustadz Achmad Sukina.

Dalam tabligh akbar itu, Wahyuddin mengatakan bahwa sesuai dengan ajaran Islam, ada lima hal terlarang dilakukan seseorang terhadap sesama manusia: memaksakan keyakinan agama kepada orang lain, menghilangkan nyawa orang lain, menyakiti fisik orang lain, mengganggu harta orang lain, dan merendahkan harga diri orang lain. Sukina mengatakan terorisme adalah cara orang meraih tujuan dengan kekerasan. Dengan demikian, tentu saja terorisme tidak bisa dikaitkan dengan Islam karena Islam melarang umatnya melakukan kekerasan untuk mencapai cita-cita.³⁵

Simpulan

Berbagai peristiwa konflik dan kekerasan atas nama agama dan terorisme agaknya menjadi kecenderungan mutakhir dalam dinamika radikalisme di kota Solo. Maka wajar apabila upaya-upaya preventif utamanya untuk mengurangi

³³ Jawa Pos Radar Solo, 26 September 2009

³⁴ Arrohmah.com, Kamis 24 September 2009

³⁵ Detiknews, 25 September 2009

ruang gerak teroris itu mesti menjadi kepedulian bersama pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat. Yang jelas wilayah ini sering dijadikan persembunyian dan perencanaan para tersangka teroris. Sudah lebih dari 20 orang pelaku teroris yang ditangkap di Surakarta. Surakarta juga merupakan sumbu pendek terhadap masalah politik dan SARA di Jawa Tengah dan nasional. Fakta menunjukkan bahwa sejak 1910 di Solo telah terjadi kerusuhan massa sebanyak 39 kali yang bernuansa etnis, agama dan politik. Beberapa peristiwa bahkan merembet ke kota-kota lain, seperti kerusuhan Mei 1998 dan kerusuhan Pilpres Oktober 1999. Secara ideologis, Surakarta merupakan basis kelompok-kelompok Islam radikal, dan aliran kejawen, serta mereka yang masih memegang kuat nilai-nilai leluhur yang dipengaruhi dua karaton Kasunanan dan Mangkunegaran.

Referensi

- Abaza, Mona. *Cultural Exchange and Muslim Education: Indonesian Students in Cairo*. University of Bielefeld, 1990.
- Agus, Sri, *Sikap dan Prilaku Masyarakat Surakarta Pasca Kerusuhan Mei 1998*. Surakarta: Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret, 2000.
- Agus, Sri, "Konflik Etnis Cina dan Jawa di Surakarta", makalah tt.
- Ali, Tariq. *The Clash of Fundamentalisms: Crusades, Jihads and Modernity*. London, New York: Verso, 2002.
- Barber, Benjamin R. *Jihad vs McWorld: How Globalism and Tribalism Are Reshaping the World*. New York: Ballantine Books, 1995.
- BPS Surakarta. *Surakarta dalam Angka*. Surakarta: BPS, 2007.
- BPS Surakarta. *Surakarta dalam Angka*. Surakarta: BPS, 2002.
- BPS Surakarta. *Surakarta dalam Angka*. Surakarta: BPS, 2000.
- BPS Surakarta. *Surakarta dalam Angka*. Surakarta: BPS, 1997.
- BPS Surakarta. *Surakarta dalam Angka*. Surakarta: BPS, 1987.
- BPS Surakarta. *Surakarta dalam Angka*. Surakarta: BPS, 1977.
- Brongtodiningrat. *Arti Keraton Yogyakarta*. Yogyakarta: Museum Keraton, 1987.
- Budi R, Muchus, "Setelah Tedjowulan, Hangabehi Dinobatkan Sebagai PB XIII", *Detiknews*, 10 September 2004.
- Budi R, Muchus, "Setelah 13 Tahun Berjalan Program Nasi Murah Buka Puasa di GKJ Solo Dihentikan Polisi", *DetikNews*, 28 Agustus 2009.
- Budi R, Muchus, "MUI Solo Gelar Tabligh Anti-Terrorisme", *DetikNews*, 25 September 2009.
- Buruma, Ian dan Margalith, Avishai. *Occidentalism: The West in the Eyes of Its Enemies*. New York: the Penguin Press, 2004.
- Devji, Faisal. *Landscapes of the Jihad: Militancy, Morality, Modernity*. London: Hurst & Company, 2005.
- Effendi, Bahtiar. *Islam and the State in Indonesia*. Singapore: ISEAS, 2003.
- Fadly, "Spanduk Penolakan Penguburan Urwah dkk Meresahkan Warga Solo", *Arrahmah.com*, Kamis 24 September 2009.
- Fananie, Zainuddin et.al. *Radikalisme Keagamaan dan Perubahan Sosial*. Surakarta: Muhammadiyah University Press dan The Asia Foundation, 2002.
- Gatra.com, 31 Agustus 2005, "Kemelut Kraton Solo PB XIII Hangabehi dan Tedjowulan Sebaiknya Buka Hati".

- <http://www.minihub.org/siarlist/msg04951.html>, 2009, "Komunitas Informasi Terbuka," *Kemenangan untuk Ancaman Kekerasan: Laskar Corps Hizbullah Surakarta Mendatangi sebuah Stasiun Radio*".
- International Crisis Group Report, no. 10, 19 Desember 2000.
- Jawa Pos Radar Solo*, Sabtu, 26 September 2009, "MUI : Keluarga Punya Hak Memakamkan".
- Juwono, Benny. "Etnis Cina di Surakarta 1890-1927: Tinjauan Sosial Ekonomi," dalam *Lembaran Sejarah* Vol. 2, No. 1, 1999.
- Listiari, Sriyani, "Karaton Kasunanan Surakarta sebagai Objek Wisata Budaya di Surakarta Tahun 1988-1997", Skripsi Fakultas Sastra UNS, 2002.
- Meuleman, Johan ed. *Islam in the Era of Globalization: Muslim Attitudes Towards Modernity and Identity*. Jakarta: INIS, 2001.
- Mohammad, Herry dan Hidayat, Rachmat, "Rumah Ibadah: Massa Bergerak Pejabat Bertindak", *Gatra* Nomor 44 Senin, 12 September 2005.
- Mulyadi, M. Hari dan Soedarmono (dkk). *Runtuhnya Kekuasaan Kraton Alit: Studi Radikalisasi Sosial "Wong Sala" dan Kerusuhan Mei 1998*. Surakarta: LPTP, 1999.
- Nurhadiantomo. *Konflik-konflik Sosial Pri-Non Pri dan Hukum Keadilan Sosial*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.
- Prasetyo, Eko. *Membela Agama Tuhan: Potret Gerakan Islam dalam Pusaran Konflik Global*. Yogyakarta: Insist Press, 2003.
- Rosyid, Imron, "Raja Kembar Solo Akhirnya Bertemu", *Tempo* interaktif, 30 Agustus 2005.
- Soedarmono, "Masyarakat Cina di Indonesia (Case Study in Surakarta)", makalah disampaikan pada Seminar Nasional Sinologi Lembaga Kebudayaan Muhammadiyah Malang Malang, 3-4 Maret 2006.
- Suatmaji, "Abu Bakar Ba'asyir Pimpin Pemakaman 2 Tersangka Teroris", *Poskota*, 13 Agustus 2009.
- Sugiartoto, Agus Dody. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kota Solo: Pendekatan Pembangunan Nguwongke Uwong*. Surakarta: IPGI, 2003.
- Suryadinata, Leo., ed. *Political Thinking of the Indonesian Chinese 1900-1995: A Sourcebook*. Singapore: Singapore University Press, 1999.
- Syahirul, Anas, "Sering Jadi Persembunyian Teroris, Status Polwil Surakarta akan Diubah", *Tempo* interaktif Solo, 4 Oktober 2004.
- Tadjoeddin, Mohammad Zulfan, "Anatomy of Social Violence in the Context of Transition: The Case of Indonesia 1990-2001", UNSFIR working papers, 2002. *Tempo*, 24 Nopember 1990, "Memoar Paku Buwana XII".
- Tempo*, No. 03/11, 25 September 2001.
- Tempo*, No. 03/11, 25 September-1 Oktober 2001.
- The Jakarta Post*, 2 Oktober 2001.
- The Straits Times*, 27 September 2001.
- The Jakarta Post*, 9 Oktober 2001.